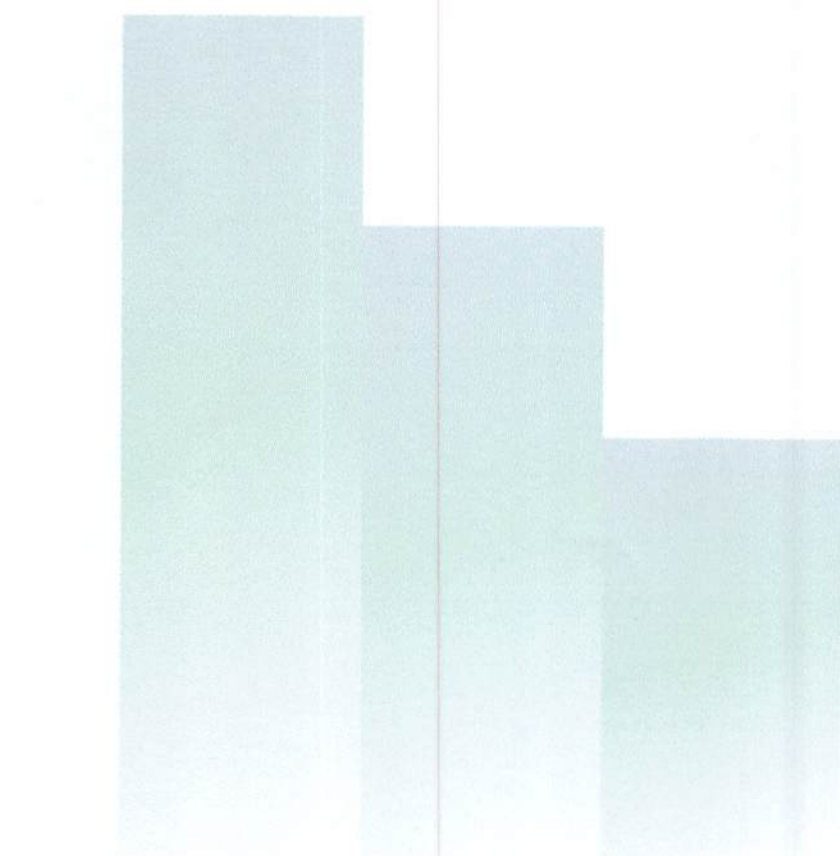




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kepada publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2023 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tahun 2019 - 2024.

Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja tahun 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Dengan 4 (empat) indicator sasaran, dan mencapai kriteria atau diatas 100%.

Berdasarkan perubahan APBD Tahun 2024, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memiliki anggaran sebesar Rp. 33.480.151.529,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.799.985.521,- atau 97,97%. Secara keseluruhan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2025 dan seterusnya akan terus ditingkatkan akselerasinya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayat dan petunjuk bagi kami, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini kami susun sebagai suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) tahun anggaran serta untuk mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsive terhadap aspirasi yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mendapat kepercayaan dari stakeholder.

Laporan hasil kinerja ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi, jika hasilnya dinilai berhasil maka akan kami pertahankan, dan jika hasilnya dinilai gagal, maka akan kami perbaiki seoptimal mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 ini, sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang yang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja urusan Perdagangan dan Perindustrian.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sumber, Pebruari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon



RAIDANG RAIMAN, S.Pd.
NIP. 19741120 200003 1 006

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

 1.2 Gambaran Umum

 1.2.1 Struktur Organisasi

 1.2.2 Fungsi dan Tugas

 1.2.3 Sumber Daya

 1.3 Isu Strategis

 1.4 Keuangan

 1.5 Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....

 2.1 Rencana Strategis Organisasi

 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

 2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

 2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

 3.4 Realisasi Anggaran

 3.5 Upaya Inovasi Pelayanan

BAB IV PENUTUP

 4.1 Kesimpulan

 4.2 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good goverment* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis

kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

I.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang mana setiap Perangkat Daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Matrik Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD Perubahan 2019 - 2024
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Eselon II		Eselon III	
Penyesuaian dengan RPJMD Perubahan 2019 - 2024 Kabupaten Cirebon		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian terhadap PDRB	Prosentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB (Prosentase) Berlaku	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar Daerah	ProgramStabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting
				ProgramPengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Keluar Negeri
				ProgramPenggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai Perdagangan DalamNegeri
				ProgramStandarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase UTTP yang bertanda tera sah
					Prosentase produk BDKT yang lolos uji
				ProgramPeningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda)
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Prosentase pertumbuhan Nilai Produksi sektor perindustrian	ProgramPerencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK
			Prosentase pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	ProgramPengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*
					Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*
					Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*
					Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*
					Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*
					Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*

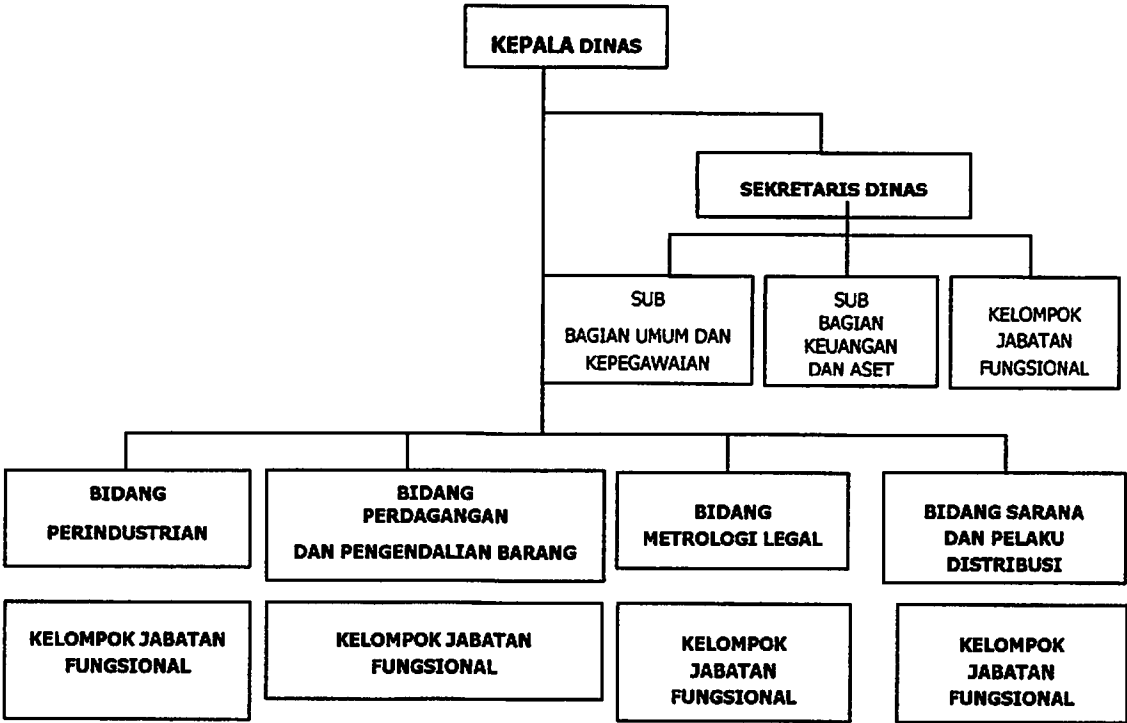
I.1.1 Struktur Organisasi

Untuk dapat menjelaskan tugas yang dibebankan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, dapat dilihat dari struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Metrologi Legal, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

I.2. Fungsi, Tugas dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, menyebutkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.

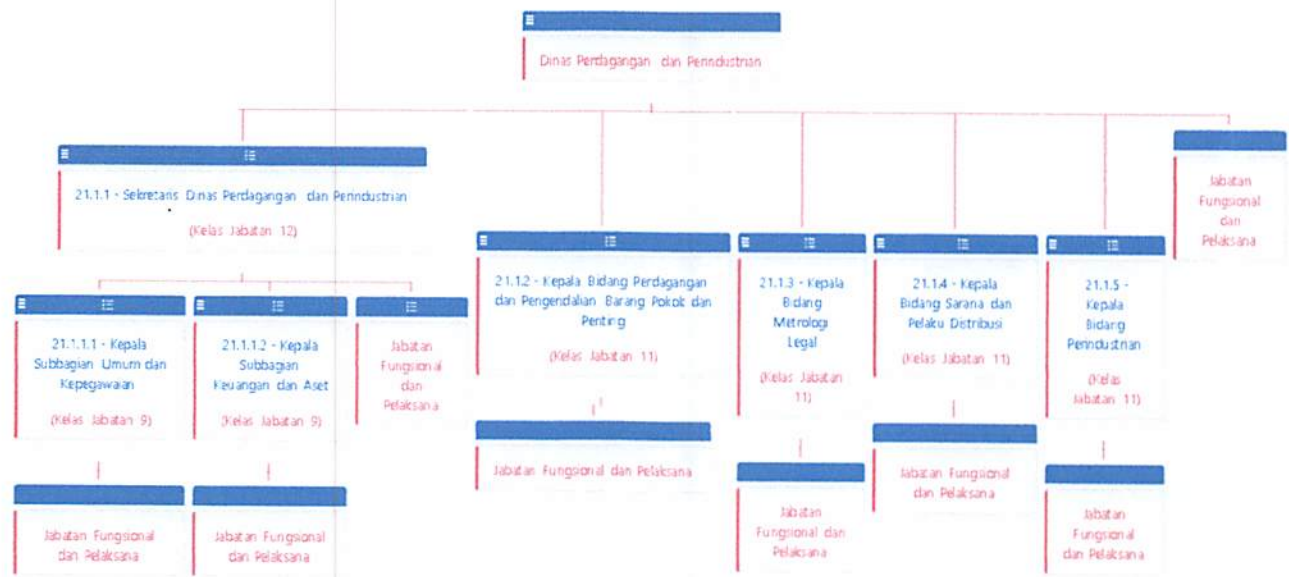
Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Fasilitasi perijinan dan pendaftaran perusahaan;
3. Peningkatan sarana distribusi perdagangan;
4. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Pengembangan ekspor;
6. Pelaksanaan metrologi legal;
7. Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
8. Perencanaan dan pembangunan industri;
9. Pengendalian izin usaha industri;
10. Pengelolaan sistem informasi industri nasional kewenangan daerah;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
12. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi.

Peta Jabatan :



JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PELAKSANA
1. Kepala Badan 2. Sekretaris: 1) Ketua Tim Kerja Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan 2) Kasubbag Keuangan dan Aset 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bidang Perindustrian : 1) Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sumber Daya Industri 2) Ketua Tim Kerja Fasilitasi dan Standardisasi Industri 3) Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri 4. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi : 1) Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan 2) Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3) Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 5. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting : 1) Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting 2) Ketua Tim Kerja Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 3) Ketua Tim Kerja Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 6. Kepala Bidang Metrologi Legal : 1) Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Metrologi Legal 2) Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang	1. Dibawah Ketua Tim Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan : a. Penyusun Perencanaan dan Penganggaran b. Penyusun Evaluasi Program 2. Dibawah Kasubag Umum dan Kepegawaian : a. Pengadministrasian Umum b. Analis Kepegawaian c. Teknisi Sarana dan Prasarana d. Pengadministrasian Kearsipan 3. Dibawah Kasubag Keuangan dan Aset : a. Pengadministrasian Keuangan b. Pengelola Akutansi c. Verifikator d. Bendahara e. Pengelola Aset 4. Dibawah Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sumber Daya Industri : a. Penyuluh Perindustian 5. Dibawah Ketua Tim Kerja Fasilitasi dan Standarisasi Industri : a. Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolah Produk b. Pembina Industri 6. Dibawah Ketua Tim Kerja Pengembanhan Sistem Informasi dan Inovasi Industri : a. Penelaah Teknis Kebijakan 7. Dibawah Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan : a. Pengawas Perdagangan 8. Dibawah Tim Kerja Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan : a. Fasilitator Perdagangan b. Pengelola Pasar 9. Dibawah Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

1. Dibawah Ketua Tim Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan :

a. Penyusun Perencanaan dan Penganggaran

b. Penyusun Evaluasi Program

2. Dibawah Kasubag Umum dan Kepegawaian :

a. Pengadministrasian Umum

b. Analis Kepegawaian

c. Teknisi Sarana dan Prasarana

d. Pengadministrasian Kearsipan

3. Dibawah Kasubag Keuangan dan Aset :

a. Pengadministrasian Keuangan

b. Pengelola Akutansi

c. Verifikator

d. Bendahara

e. Pengelola Aset

4. Dibawah Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sumber Daya Industri :

a. Penyuluh Perindustrian

5. Dibawah Ketua Tim Kerja Fasilitasi dan Standardisasi Industri :

a. Penngadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolah Produk

b. Pembina Industri

6. Dibawah Ketua Tim Kerja Pengembanhnan Sistem Informasi dan Inovasi Industri :

a. Penelaah Teknis Kebijakan

7. Dibawah Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan :

a. Pengawas Perdagangan

8. Dibawah Tim Kerja Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan :

a. Fasilitator Perdagangan

b. Pengelola Pasar

9. Dibawah Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

I.3. Isu-Isu Strategis

Analisis terhadap isu strategis yang berpengaruh ini, dilandaskan kepada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan pembangunan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang akuntabel. Faktor-faktor tersebut yang akan dijadikan arah pembangunan antara lain :

1. Potensi pasar dalam negeri Indonesia termasuk Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon pada khususnya relatif masih besar untuk dapat menyerap berbagai hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti kelompok makanan, kelompok sandang, dan sebagainya.

Sebagian besar diharapkan dapat dipasok oleh para pelaku usaha industri dan perdagangan yang beroperasi di Kabupaten Cirebon. Tetapi faktanya masih belum optimal dalam mengembangkan jaringan distribusi dan sarana prasarana perdagangan dalam negeri.

2. Kestabilan suplai bahan pokok dan strategis, fluktuasi harga dan tingkat inflasi

Indikasi kenaikan harga yang fluktuatif pada periode tertentu disamping faktor musim juga mengindikasikan sistem distribusi yang kurang lancar. Pengendalian komoditas bahan pangan dan beberapa komoditi strategis lainnya sangat penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat banyak serta berdampak kepada tingkat inflasi.

3. Metrologi Legal dan Pengawasan barang beredar belum optimal

Peredaran barang di wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak yang belum memenuhi standar mutu produk sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku dan terbatasnya petugas pengawas barang beredar, disamping rendahnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang.

Kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan, tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam

rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

4. Meningkatkan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

Pasar tradisional merupakan salah satu sarana perdagangan yang berkaitan dengan pedagang kecil serta merupakan sarana bagi pemasaran produk hasil pertanian. Meskipun pasar di Kabupaten Cirebon (pasar pemda dan pasar desa) relatif banyak namun keberadaannya harus berbenah seiring dengan tumbuh berkembangnya toko modern yang memperjualbelikan barang yang sama.

5. Mengembangkan Produktifitas Sektor Industri dan Meningkatkan Peranan Industri sehingga mampu berdaya saing

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Dalam mewujudkan pertumbuhan industri andalan/unggulan daerah, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap industri andalan/unggulan yang dikembangkan sehingga Kabupaten Cirebon mampu membangun industri yang utuh dan mandiri. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut digunakan untuk riset dan pengembangan produk yang terintegrasi serta merupakan suatu siklus yang terstruktur.

I.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

I.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon adalah berjumlah 81 (delapan puluh satu) orang pegawai yang terbagi pada Kesekretariatan dan 4 Bidang, terdiri dari 8 Pejabat Struktural, 20 Fungsional dan 31 Pelaksana.

	PEJABAT STRUKTURAL : • Sebanyak 8 orang
	PEJABAT FUNGSIONAL : • Sebanyak 22 Orang
	PELAKSANA : • Sebanyak 31 Orang

	
Laki – Laki Sebanyak 76 Orang	Perempuan Sebanyak 27 Orang

	Pendidikan S2 Sebanyak 9 Orang Pegawai
	Pendidikan S1 Sebanyak 47 Orang Pegawai
	Pendidikan D3 Sebanyak 4 Orang Pegawai
	Pendidikan SLTA Sederajat Sebanyak 40 Orang Pegawai
	Pendidikan SLTP Sederajat Sebanyak 2 Orang Pegawai
	Pendidikan SD Sederajat Sebanyak 2 Orang Pegawai

I.4.2 Asset / Sarana dan Prasarana

Asset (Modal) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jumlah asset (modal) yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana - Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH UNIT	NILAI ASET (Rp.)
	ASET TETAP		
1	Tanah	14 Bidang	6.133.789.070,00
2	Alat Angkutan	7 Unit	1.318.841.905,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	265 Unit	1.148.587.460,00
4	Alat Pertanian	5 Unit	9.994.300,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	475 Unit	3.281.451.216,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	85 Unit	280.209.296,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	320 Unit	203.994.000,00
8	Alat Laboratorium	241 Unit	1.218.491.250,00
9	Komputer	85 Unit	805.311.682,00
10	Alat Keselamatan Kerja	25 Unit	2.500.000,00
11	Bangunan dan Gedung	57 Unit	150.325.430.456,00
	ASET LAINNYA		
1	Aset Tidak Berwujud	5 Unit	81.395.500,00
JUMLAH			147.854.308.806,50

Sumber : Data Keuangan dan Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan

I.4.3 Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon dan Sumber Lainnya. Alokasi anggaran murni Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.591.604.345,- dan anggaran perubahan sebesar Rp23.325.852.477,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.6
Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp.)
				Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp.)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.486.125.500	3.013.397.000	527.271.500
4	1	02	Retribusi Daerah	2.486.125.500	3.013.397.000	527.271.500
			Jumlah Pendapatan	2.486.125.500	3.013.397.000	527.271.500
5			BELANJA DAERAH			
5	1		Belanja Operasi	15.402.008.440	16.684.149.529	1.282.141.089
5	1	01	Belanja Pegawai	9.530.342.000	9.631.843.177	101.501.177
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.871.666.440	7.052.306.352	1.180.639.912
5	2		Belanja Modal	2.305.500.000	16.796.002.000	14.490.502.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	72.502.000	72.502.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.305.500.000	16.723.500.000	14.418.000.000
			Jumlah Belanja	17.707.508.440	33.480.151.529	15.772.643.089
			Total Surplus/(Defisit)			
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
			Pembiayaan Netto			

I.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/675-Sekret Tanggal 15 Pebruari 2024 tentang LHE AKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 atas SAKIP Tahun 2023 :

Tabel 1.7

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Membuat laporan review Renstra dan dievaluasi secara berkala per triwulan	Disperdagin telah membuat laporan Triwulan I-IV Tahun 2023
		2. Melampirkan bukti dukung Perbup atau SK Bupati mengenai Renja dan Renja Perubahan Tahun 2023	Disperdagin telah melampirkan Peraturan Bupati atau SK Bupati mengenai Renja dan Renja Perubahan Tahun 2023
		3. Menyusun mekanisme pengumpulan data dalam penetapan IKU Perubahan Tahun	Disperdagin telah menyampaikan Dokumen SOP Penyusunan IKU dan Perkin disertai dengan

No	Komponen Yang Dinilai	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
		2023	Flowchart
		4. Membuat notulen rapat yang dipimpin dan ditandatangani oleh kepala dinas terkait pencapaian kinerja	Notulen rapat evaluasi kinerja telah ditandatangani Kepala Dinas
2	Pengukuran Kinerja	5. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	Disperdagin telah menyelesaikan Dokumen SOP Pengumpulan data dan pengukuran Kinerja disertai dengan flowchart
		6. Melampirkan dokumen penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional berdasarkan pengukuran capaian kinerja	Telah melampirkan dan menyelesaikan dokumen penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional berdasarkan pengukuran capaian kinerja
3	Pelaporan Kinerja	7. Melengkapi dengan hasil rapat/notulen atas pencapaian kinerja yang di formalkan oleh Kepala Dinas	Notulen rapat pencapaian Kinerja yang telah diformalkan oleh Kepala Dinas Telah disampaikan
		8. Melengkapi Laporan kinerja dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya	Laporan informasi perbandingan capaian kinerja antar tahun telah dibuat dan diserahkan
		9. Dokumen laporan kinerja agar menyajikan data perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi (Benchmark Kinerja)	Didalam laporan kinerja, Disperdagin telah menyajikan informasi data perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan provinsi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10. Agar membuat Notulen/Laporan Hasil Evaluasi Internal LAKIP	Disperdagin telah mebuat Notulen Rapat Evaluasi Internal LAKIP Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2019 – 2024 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Bupati.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis dan Aman"

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya;
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat
2. Kabupaten Cirebon Sejahtera;
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi
3. Kabupaten Cirebon Agamis;

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. Kabupaten Cirebon Maju;

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Kabupaten Cirebon Aman.

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dari lima misi tersebut, salah satunya Misi keempat yaitu : **"Kabupaten Cirebon Maju yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"**

Dengan tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan".

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan Perdagangan dan Perindustrian yaitu : **"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan"**.

II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra SKPD.

Adapun Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon **adalah "Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor perindustrian terhadap PDRB"**.

Dengan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian
3. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan yang smart, efisien dan bersih.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN STRATEGI SERTA INDIKATOR
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Target Akhir Renstra
				Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian Terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan	%	1,6	1,7	0	0	0	0
		Jumlah Pedagang/Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	320	325	0	0	0	0
		Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	UTTP	10.000	18.000	0	0	0	0
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar Daerah	%	0,00	0,00	11,98	11,65	11,36	11,36
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Jumlah IKM yang terfasilitasi teknologi dan standardisasi produk	IKM	140	210	0	0	0	0
		Jumlah pengrajin yang mendapat pembinaan dan pelatihan	Orang	240	370	0	0	0	0
		Prosentase pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Perindustrian	%	0	0	1,17	1,22	1,27	3,66
		Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	%	0,00	0,00	1,20	1,25	1,30	3,75
	Meningkatnya kualitas pelayanan publi	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,40	76,45	76,50	76,55	82,60	82,6

II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.2
TUJUAN, SASARAN STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Peningkatan pengembangan jaringan pemasaran	Mengembangkan akses informasi dan pemasaran pasar perdagangan luar negeri
			Mengembangkan jaringan distribusi dan sarana prasarana perdagangan dalam negeri
		Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang
			Meningkatkan Pengawasan dan pelayanan Metrologi Legal
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Peningkatan daya saing melalui pengembangan industri kompetitif	Mengembangkan produktifitas sektor industri dan meningkatkan Peranan Industri sehingga mampu berdaya saing
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Administrasi, SDM Aparatur, Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi urusan Pemerintahan	Pembinaan bagi aparatur melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, Pendidikan dan Pelatihan bagi struktural dan fungsional dalam rangka meningkatkan pelayanan

II.3 Struktur Program daan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	208.205.500,00	458.347.700,00	250.142.200,00
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	208.205.500,00	458.347.700,00	250.142.200,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.434.700,00	6.434.700,00	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	46.003.500,00	296.145.700,00	250.142.200,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	35.919.400,00	35.919.400,00	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	119.847.900,00	119.847.900,00	0,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	30.822.100,00	30.822.100,00	0,00
	Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	30.822.100,00	30.822.100,00	0,00

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.822.100,00	30.822.100,00	0,00
Total Anggaran Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Sasaran No. 1		239.027.600,00	489.169.800,00	250.142.200,00
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.610.090.700,00	20.960.983.900,00	15.350.893.200,00
	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	4.469.848.000,00	19.549.760.000,00	15.079.912.000,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.469.848.000,00	19.549.760.000,00	15.079.912.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.140.242.700,00	1.411.223.900,00	270.981.200,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	892.399.500,00	975.388.800,00	82.989.300,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	247.843.200,00	435.835.100,00	187.991.900,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	172.918.600,00	222.918.600,00	50.000.000,00
	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/Kota	58.004.400,00	58.004.400,00	0,00

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	58.004.400,00	58.004.400,00	0,00
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	114.914.200,00	164.914.200,00	50.000.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	14.914.200,00	14.914.200,00	0,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	21.728.400,00	11.514.000,00	-10.214.400,00
	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	21.728.400,00	11.514.000,00	-10.214.400,00
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	21.728.400,00	11.514.000,00	-Rp10.214.400,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	178.796.400,00	263.796.100,00	84.999.700,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	178.796.400,00	263.796.100,00	84.999.700,00

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	109.227.300,00	119.204.500,00	9.977.200,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	69.569.100,00	144.591.600,00	75.022.500,00
	Program Pengembangan Ekspor	74.533.600,00	84.747.800,00	10.214.200,00
	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	74.533.600,00	84.747.800,00	10.214.200,00
	Pameran Dagang Nasional	74.533.600,00	84.747.800,00	10.214.200,00
Total Anggaran Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Sasaran No. 2		6.058.067.700,00	21.543.960.400,00	15.485.892.700,00
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.410.413.140,00	11.447.021.329,00	36.608.189,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.734.000,00	121.576.500,00	1.842.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.018.400,00	5.018.400,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.346.400,00	1.346.400,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.854.200,00	50.854.200,00	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.515.000,00	64.357.500,00	1.842.500,00

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.572.096.900,00	9.673.598.077,00	101.501.177,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.530.342.000,00	9.631.843.177,00	101.501.177,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.369.200,00	1.369.200,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.385.700,00	40.385.700,00	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	713.402.268,00	199.998.380,00	-513.403.888,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	713.402.268,00	199.998.380,00	-513.403.888,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	658.800,00	658.800,00	0,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	658.800,00	658.800,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.059.200,00	590.466.600,00	172.407.400,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.090.300,00	10.090.300,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	56.268.000,00	56.268.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.339.200,00	88.789.200,00	1.450.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.568.600,00	52.745.900,00	-11.822.700,00

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)		Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	79.431.100,00	79.431.100,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.486.500,00	199.998.600,00	126.512.100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.123.500,00	43.123.500,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.916.572,00	543.177.572,00	39.261.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.056.572,00	274.056.572,00	0,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.860.000,00	89.121.000,00	39.261.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.545.400,00	317.545.400,00	235.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.445.400,00	36.445.400,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.100.000,00	281.100.000,00	235.000.000,00
Total Anggaran Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Sasaran No. 3		11.410.413.140,00	11.447.021.329,00	36.608.189,00

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
- 2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
- 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar Daerah	11,36 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	1,30 %
		Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Perindustrian	1,27 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,60 %

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan program dan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran	
	Sebelum	Sesudah
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	208.205.500	458.347.700
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	30.822.100	30.822.100
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.610.090.700	20.960.983.900
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	172.918.600	222.918.600
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	21.728.400	11.514.000
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	178.796.400	263.796.100
Program Pengembangan Ekspor	74.533.600	84.747.800
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.410.413.140	11.447.021.329
JUMLAH	17.707.508.440	33.480.151.529

- BAB III Berisi :**
- 1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
 - 2. *Capaian Kinerja Lainnya*
 - 3. *Efisiensi Anggaran*
 - 4. *Inovasi*

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan

cara :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.
- 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Realisasi 2023	TAHUN 2024				Target Akhir Renstra
				Target 2024	Realisasi 2024	%	Kriteria	
2	3	5		10				11
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Indikator : Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Daerah	%	4,85	11,36	12,10	106,51	Sangat Baik	11,36
	Meta Indikator : $\text{Nilai Ekspor Luar Negeri} + \text{Nilai ekspor Luar Daerah Tahun Berjalan}$							
Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Prosentase pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Perindustrian	%	1,22	1,27	1,29	101,57	Sangat Baik	3,66
	$= \frac{\text{Jumlah Nilai Produksi IKM Tahun } n - n - 1}{\text{Jumlah Nilai Produksi IKM Tahun lalu}} \times 100 \%$							
	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	%	1,25	1,30	1,32	101,54	Sangat Baik	3,75
	$= \frac{\text{Jumlah IKM Tahun } n - n - 1}{\text{Jumlah IKM Tahun lalu}} \times 100 \%$							
Meningkatnya kualitas pelayanan publi	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,55	82,60	82,61	100,01	Sangat Baik	82,6
	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$							

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

A. Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Kinerja sasaran Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan diukur dengan indicator dan meta indicator sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Meta Indikator
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Daerah	%	Nilai Ekspor Luar Negeri + Nilai ekspor Luar Daerah Tahun Berjalan

Kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan diukur dengan menggunakan meta indicator nilai ekspor luar negeri ditambah dengan nilai ekspor keluar daerah tahun berjalan. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran perangkat daerah dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2024 terhadap Target 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar Daerah	4,85 %	11,36 %	12,10 %	106,51	11,36 %	106.51

Analisis ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 12,10 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 106,51 % atau terlampaui.
- b. Pencapaian sasaran ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 40.08 % dari tahun 2023 sebesar 4,85% menjadi 12.10% di tahun 2024.
- c. Capaian target indicator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2024 sebesar 106.51% (melampaui).

Tingkat keberhasilan sasaran 1, dengan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan tersebut, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda)	1 Pasar	1 Pasar	100,00
Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi tepat waktu dan berfungsi / dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya	3 Sarana	3 Sarana	100,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	100,00
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok Pengelola/usaha informal	1 Kelompok	1 Kelompok	100,00
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	1 Dok	100,00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dok	2 Dok	100,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting	8,5	1,8	21,18
Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	11 Satuan/ unit	11 Satuan/unit	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24 laporan	24 Laporan	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jenis Kepokmas dan barang penting yang harganya terkendali	11 Jenis Barang	11 Jenis Barang	100,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	4 Laporan	100,00
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai perdagangan dalam negeri	22.452.716.710.000	16.141.277.039.935	71,89
Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah promosi perdagangan yang dipromosikan / pemasaran	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	20 UMKM	100,00
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase UTTP yang bertanda tera sah	60,31%	67,92%	112,62
	Prosentase produk BDKT yang lolos uji	42%	19,00%	45,24
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah UTTP dan BDKT yang sesuai standar Metrologi legal	16.000 Unit	11.385 Unit	71,16

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	16.000 Unit	11.385 Unit	71,16
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2.050 Orang	2.043 Orang	99,66
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor ke luar Negeri	\$ 417.857.601,67	\$ 423.893.321,88	
Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang diikuti	8 Pameran	8 Pameran	100,00
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	100,00

Capaian tersebut didukung dari :

a. **Capaian Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Indikator program peningkatan sarana distribusi perdagangan yaitu Jumlah sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda). Target capaian indikator ini pada tahun 2024 yaitu 1 Pasar, sedangkan realisasi sebanyak 1 pasar atau tercapai 100% dari target. Perhitungan realisasi dari rata-rata peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah dilihat dari jumlah pasar yang telah ber SNI.

Penyerahan Piagam Sertifikat SNI Pasar Jamblang



1) **Capaian Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**

Indikator kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi tepat waktu dan berfungsi / dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Target indikator kegiatan ini yakni 3 sarana, sedangkan realisasi sebanyak 3 sarana atau 100%.

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan mempunyai sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan. Target dari sub indikator ini yaitu 2 unit dengan realisasi sebanyak 2 unit (100%).

SEBELUM DI REVITALISASI



SETELAH DI REVITALISASI



- 2) Capaian Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Indikator Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya yaitu Cakupan bina kelompok pengelola/usaha informal. Target indikator kegiatan ini 1 kelompok binaan sedangkan pencapaiannya 1 kelompok atau tercapai 100%.

Kegiatan Bina Kelompok Pengelola/Pedagang Pasar



- b. **Capaian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Indikator program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting. Target indikator ini sebesar 8,5 point, sedangkan realisasi sebesar 1,8 point. Nilai dari indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar koefisien varian antar waktu yang didapat akan menunjukkan adanya kesenjangan harga dari Harga Eceran Tertinggi dengan yang ada di pasaran. Capaian dari indikator ini didapat dari kegiatan Pemantauan harga di pasar yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting.

Kegiatan Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting dan Operasi Pasar



c. Capaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yaitu Nilai Perdagangan Dalam Negeri. Target dari indicator program ini adalah sebesar Rp.22.452.716.710.000,- sedangkan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp.16.141.277.039.935,- atau tercapai sebesar 71,89%.

Program ini didukung oleh satu kegiatan yakni Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan indicator jumlah promosi perdagangan yang dipromosikan/pemasaran dengan target 2 kegiatan dengan pencapaian sebanyak 2 kegiatan (tercapai 100%) dan dengan didukung oleh satu sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah UMKM yang memperoleh Fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelah dan jasa akomodasi dengan target 20 UMKM dan terealisasi sebanyak 20 UMKM (tercapai 100%).

Kegiatan Promosi di Arena Pameran Bagi UMKM



d. Capaian Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Capaian Indikator dari Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yaitu Prosentase UTP yang bertanda tera sah dengan target 60,31% terealisasi 67,92% (tercapai 112,62%) dan Prosentase Produk BDKT yang lolos uji dengan target 42% terealisasi 19,00% (tercapai 45,24%). Program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, tera ulang dan pengawasan dengan indicator Jumlah UTP dan BDKT yang sesuai standar Metrologi Legal. Target dari kegiatan ini adalah 16.000 Unit dengan realisasi sebanyak 11.385 unit atau tercapai sebesar 71,16%.

Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen



e. Capaian Program Pengembangan Ekspor

Capaian indikator dari Program pengembangan ekspor yaitu Nilai ekspor Keluar Negeri. Target dari indikator ini adalah sebesar \$ **417.857.601,67**, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar \$ **423.893.321,88**. Indikator ini diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan penataan dan pengelolaan kegiatan perdagangan di Kabupaten Cirebon;
2. Komitmen dan Pemahaman yang semakin baik dari pada stakeholder terkait implementasi kegiatan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Cirebon;
3. Dukungan anggaran baik melalui APBD, APBD Provinsi Jawa Barat maupun dari APBN, adanya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan serta adanya dukungan dari meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Faktor Penghambat

1. Proses Pengadaan barang dan jasa yang masih belum kondusif pada beberapa bagian.
2. Terbatasnya kewenangan dalam penataan kegiatan perdagangan dan perindustrian di tingkat Kabupaten.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Kinerja sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Meta Indikator
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Prosentase pertumbuhan Produksi Perindustrian	Nilai Sektor %	Jumlah nilai produksi IKM tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya dibagi Jumlah nilai produksi IKM tahun lalu di kali seratus persen
		Prosentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Jumlah Menengah %	Jumlah IKM tahun berjalan dikurangi jumlah tahun kemarin dibagi Jumlah IKM tahun lalu dikali seratus persen

Kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2024 terhadap Target 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Perindustrian	1,22 %	1,27 %	1,29 %	101,57	3,66 %	100,54
2.	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	1,25 %	1,30 %	1,32 %	101,54	3,75 %	100,53

Analisis ketercapaian sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian adalah sebagai berikut :

- Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indicator yakni Prosentase pertumbuhan nilai produksi sektor perindustrian dengan target 1,27% dan terealisasi sebesar 1,29 % atau tercapai 101,57%. Dan indicator Prosentase pertumbuhan jumlah industry kecil menengah dengan target sebesar 1,30% dan terealisasi sebesar 1,32% atau tercapai 101,54%.

2. Pencapaian sasaran Prosentase pertumbuhan nilai produksi sektor perindustrian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 98,73% dari tahun 2023 sebesar 1,22% menjadi 1.27% di tahun 2024.
3. Pencapaian sasaran Prosentase pertumbuhan jumlah industri kecil menengah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 98,73% dari tahun 2023 sebesar 1,25% menjadi 1.30% di tahun 2024.
4. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2024 sebesar 106.51% (melampaui).

Tingkat keberhasilan sasaran 2, dengan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan tersebut, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK	20%	20 %	100,00
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK Kab. Cirebon sampai dengan ditetapkannya menjadi RAPERDA	1 Dok	1 Dok	100,00
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	1 Dok	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dok	1 Dok	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	1 Dok	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	1 Dok	100,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan indusri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	35%	35%	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 Dok	1 Dok	100,00
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	1 Dok	100,00

Capaian sasaran ini didapat dari :

a. Capaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Program Perencanaan dan Pembangunan yaitu Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK. Target capaian indicator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 20%, sedangkan realisasi sebesar 20% atau tercapai 100% dari target.

Kegiatan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



b. Capaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yaitu Persentase data perusahaan indusri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota dengan target 35%, sedangkan realisasinya sebesar 35% atau tercapai 100%.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public sebagaimana indicator dan meta indicator sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Meta Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Total Nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d. 2024 terhadap Target 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	76,55%	82,60%	82,61%	100,01	82,60%	100,01

Tingkat keberhasilan sasaran 3, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik tersebut, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*	100%	100%	100%
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*	100%	100%	100%
	Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*	100%	100%	100%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*	100%	100%	100%
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*	100%	100%	100%
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan dan perindustrian*	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Presentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	4 Dok	100%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	200%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	200%	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	2 Dok	100%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	200%	100%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	2 Dok	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%	200%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	13 Dok	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	7 Dok	100%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	200%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	200%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

- Capaian tersebut didukung dari :
- a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja dinas;
 - b. Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan PNS;
 - c. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d. Penyediaan sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian;
 - e. Terselenggaranya proses pemeliharaan gedung;
 - f. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Koordinasi internal berjalan dengan baik
- b. Koordinasi dengan pihak penyedia berjalan baik
- c. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Faktor Penghambat

- a. Perubahan peraturan yang ada di pusat tentang pengelolaan keuangan daerah

III.2 Capaian Kinerja Lainnya

- a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda Kabupaten Cirebon dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana table sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Kontribusi Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,07%		Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Prosentase pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Perindustrian	1,27 %	1,29%
						Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	1,30 %	1,32 %
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75 %		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar Daerah	11,36%	12,10 %
3.	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	3,50 %		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,60%	82,61%

III.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp.)
			Target	Realisasi	%	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar Daerah	11,36%	12,10%	106,51	21.543.960.400	21.381.182.502	99,24	162.777.898
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Prosentase pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Perindustrian	1,27%	1,29%	101,6	458.347.700	431.044.330	94,04	27.303.370
		Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	1,30%	1,32%	101,54	30.822.100	30.650.440	99,44	171.660
3.		Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,60%	82,61%	100,01	11.447.021.329	10.946.660.848	95,63	500.360.481
JUMLAH						33.480.151.529	32.327.843.350	97,97	690.613.409
TOTAL BELANJA OPERASIONAL						33.480.151.529	32.327.843.350	97,97	690.613.409

Berdasarkan table diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 33.480.151.529,-, terealisasi Rp.32.327.843.350,- atau 97,97% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp. 690.613.409,- atau 2,03% yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja pegawai
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi belnaja sewa hotel/gedung

BAB IV PENUTUP

BAB IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan*

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan penataan dan pengelolaan kegiatan perdagangan di Kabupaten Cirebon;
2. Komitmen dan Pemahaman yang semakin baik dari pada stakeholder terkait implementasi kegiatan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Cirebon;
3. Dukungan anggaran baik melalui APBD, APBD Provinsi Jawa Barat maupun dari APBN, adanya koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan serta adanya dukungan dari meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Faktor Penghambat

1. Proses Pengadaan barang dan jasa yang masih belum kondusif pada beberapa bagian.
2. Terbatasnya kewenangan dalam penataan kegiatan perdagangan dan perindustrian di tingkat Kabupaten.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADANG RAIMAN, S Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

WAHYU MIJAYA

DADANG RAIMAN, S Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 1 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian terhadap PDRB	Prosentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB (Prosentase) Berlaku	$(\text{PDRB ADHK sektor Perdagangan} / \text{total PDRB ADHK} \times 100 \%)$	Non Kumulatif	Meningkat	PDRB dan BPS	17.53 Prosen	17.53 Prosen
		Prosentase kontribusi Perindustrian terhadap PDRB (Prosentase) Berlaku	$(\text{PDRB ADHK sektor Industri} / \text{total PDRB ADHK} \times 100 \%)$	Non Kumulatif	Meningkat	PDRB dari BPS	23.6 Prosen	23.6 Prosen
1.1.01.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Keluar daerah	Nilai Eksport Luar Negeri + Nilai ekspor Keluar Daerah Tahun Berjalan	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah nilai ekspor keluar daerah	11.36 Prosen	11.36 Prosen
1.1.02.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Prosentase pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah	$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun 2023}}{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun 2023}} \times 100 \%$	Kumulatif	Meningkat	Data Pertumbuhan Industri	1.3 Prosen	1.3 Prosen
1.1.03.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat*	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	hasil nilai survey kepuasan masyarakat	82.6 Prosen	82.6 Prosen

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.610.090.700,00	20.960.983.900,00	Sumber Dana: BanKeu Prov, BPHTB, DTU-DAU, DTU-DBH, Pendapatan Bagi Hasil-PKB, Pjk Hotel, Pjk Reklame, Pjk Restoran
1.1.01.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	172.918.600,00	222.918.600,00	Sumber Dana: BPHTB, Pjk Reklame
1.1.01.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	74.533.600,00	84.747.800,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, Pjk Reklame
1.1.01.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	178.796.400,00	263.796.100,00	Sumber Dana: BPHTB, DTU-DAU, DTU-DBH, Pjk Reklame
1.1.01.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21.728.400,00	11.514.000,00	Sumber Dana: Pjk Reklame
1.1.02.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	208.205.500,00	458.347.700,00	Sumber Dana: Pjk Reklame
1.1.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.822.100,00	30.822.100,00	Sumber Dana: BPHTB, Pjk Reklame
1.1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.410.413.140,00	11.390.753.329,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
J U M L A H		17.707.508.440,00	33.423.883.529,00	

Pihak Kedua
Pj. Bupati Cirebon,



WAHYU MIJAYA

Sumber, Oktober 2024
Pihak Kesatu
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian,



DADANG RAIMAN, S Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 1 006

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan													
		TW I	TW II	TW III	TW IV						Triwulan			Triwulan			Triwulan			Triwulan				
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.860.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Lingkungan Dinas.														
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	Penyediaan bagi Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	82.545.400,00															
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	36.445.400,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	46.100.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Total Anggaran Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Sasaran No. 3									11.410.413.140,00															

Sumber, 28 Desember 2023
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon



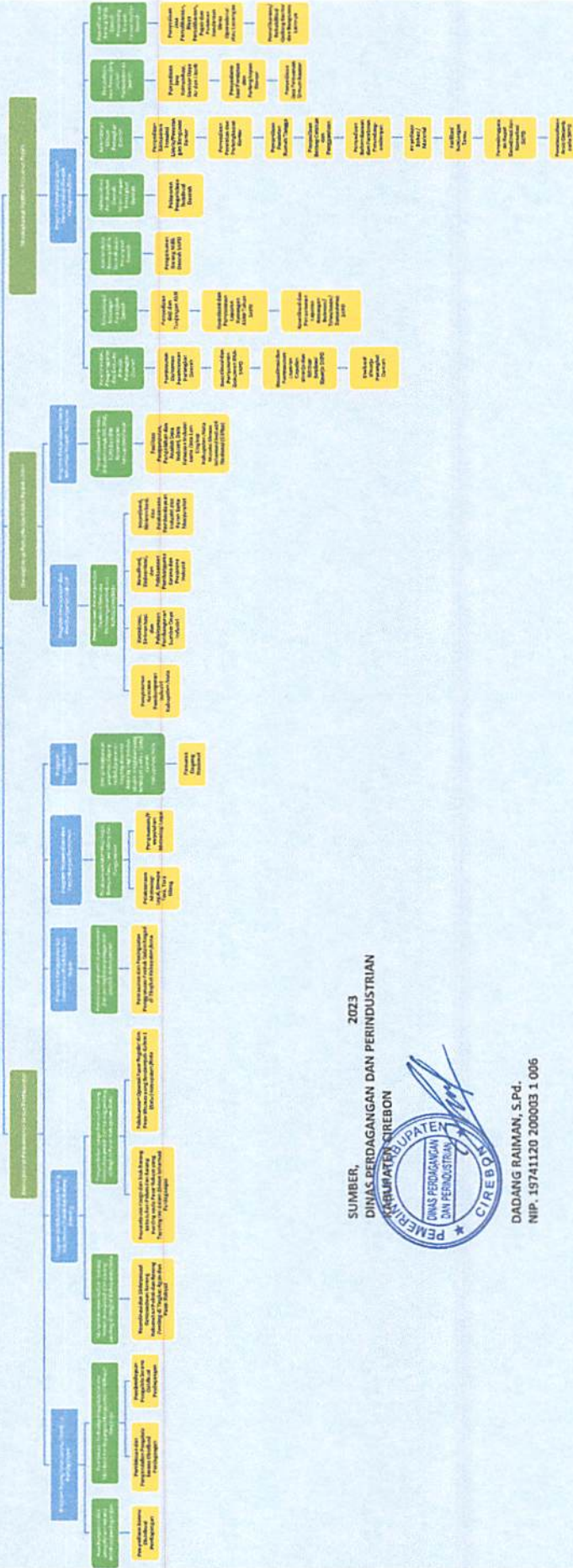
BADANG RAIMAN, S.Pd.
NIP. 19741120 200003 1 006

POHON KINERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera,
Agamis, dan Aman

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional
dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan
sektor perindustrian terhadap PDRG



SUMBER,
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON



DADANG RAIMAN, S.Pd.
NIP. 19741120 200003 1 006